
IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (STUDI DI KELURAHAN SUMBER AGUNG KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG)

Faradipa¹, Novita Tresiana², Ani Agus Puspawati³

¹²³Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

Alamat Korespondensi: faradipa2000@gmail.com

Abstract: *To achieve family prosperity, women play an important role in the process. Increasing family welfare will contribute to the country's efforts to reduce poverty levels, especially in areas with a relatively high concentration of poor people. In other words, one of the secrets of getting out of poverty and backwardness is women's active participation. Women must participate and be involved in all stages of development, along with the development of the P3KSS program to become one of the government's initiatives to strengthen the role of women in development. This research uses qualitative techniques combined with descriptive strategies. In this research, interviews, observation and documentation are the methods used to collect data. The study findings show that the standard indicators and targets are well defined; policy resources have not been fully utilized due to lack of funding; communication between organizations and related activities has not run smoothly in implementing the P3KSS program; the characteristics of implementing agents have been well received; the implementer's disposition to accept the program well; and optimal economic, social and political conditions and no political interests being exploited.*

Keywords: *implementation, P3KSS program, women's role.*

Abstrak: *Untuk mencapai kesejahteraan keluarga, perempuan berperan penting dalam proses tersebut. Peningkatan kesejahteraan keluarga akan memberikan kontribusi terhadap upaya negara untuk menurunkan tingkat kemiskinan, khususnya di daerah-daerah dengan konsentrasi penduduk miskin yang relatif tinggi. Dengan kata lain, salah satu rahasia keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan adalah partisipasi aktif perempuan. Perempuan harus berpartisipasi dan terlibat dalam seluruh tahapan pembangunan, seiring dengan berkembangnya program P3KSS menjadi salah satu inisiatif pemerintah untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yang dipadukan dengan strategi deskriptif. Dalam penelitian ini, wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Temuan studi menunjukkan bahwa indikator dan target standar telah didefinisikan dengan baik; sumber daya kebijakan belum dimanfaatkan sepenuhnya karena kurangnya pendanaan; komunikasi antar organisasi dan kegiatan terkait belum berjalan lancar dalam pelaksanaan program P3KSS; karakteristik agen pelaksana telah diterima dengan baik; disposisi pelaksana untuk menerima program dengan baik; dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik optimal dan tidak ada kepentingan politik yang dieksploitasi.*

Kata Kunci: *implementasi, peranan perempuan, program P3KSS.*

Pendahuluan

Pemberdayaan perempuan diartikan sebagai upaya mereka untuk memperoleh sumber daya ekonomi, politik, sosial, dan budaya serta penguasaan atas sumber daya tersebut guna mengorganisir diri, meningkatkan harga diri untuk mampu berperan, dan berpartisipasi aktif dalam pemecahan masalah guna mencapai tujuan. Untuk mengembangkan keterampilan dan konsep diri mereka. Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk membantu mereka mencapai potensi maksimal mereka sehingga mereka dapat memecahkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan bidang lainnya. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan No. 41/Kep/Meneg.pp/viii/2007/ merupakan salah satu inisiatif yang dikembangkan pemerintah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan negara di masa depan. Tanggal 31 Agustus 2007, dan berkaitan dengan Pedoman Umum Revitalisasi Program Peningkatan Peran Perempuan dalam Mempromosikan Keluarga Sehat dan Sejahtera (P3KSS). Untuk mendukung pilihan yang diambil Menteri Pemberdayaan Perempuan.

Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P3KSS) di Daerah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka meningkatkan peran perempuan di daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan ini. Menurut Saptandari (2012), mendorong perempuan untuk berperan lebih besar dalam pembangunan negaranya merupakan salah satu cara untuk mencoba mengatasi permasalahan ini. Menurut Hubeis, sebagaimana dikutip dalam Wildan Saugi dan Sumarno (2015), pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk meningkatkan kontribusi perempuan terhadap pembangunan negaranya dan taraf hidup mereka di berbagai bidang, termasuk pekerjaan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Program Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P3KSS) menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas dan peran perempuan dalam berbagai aspek. Selain itu, Program ini juga menjadi bagian integral dari program pemerintah berkaitan dengan pembangunan pemberdayaan perempuan yang berdampak pada pembangunan yang adil dan setara gender (Lestari et al., 2019). Kurangnya komunikasi antara pelaksana dengan warga yang membutuhkan bantuan dalam menjalankan kewajibannya, serta kurangnya dana, diidentifikasi sebagai permasalahan dalam proses pelaksanaan program P3KSS. Jika kebijakan tersebut tidak dijalankan dengan benar, maka program P3KSS pemerintah tidak akan memberikan hasil yang diinginkan (Linawati, 2016).

Penjelasan di atas menjelaskan mengapa peneliti tertarik untuk membicarakan pelaksanaan program P3KSS di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Intinya, implementasi suatu program

didukung dengan baik oleh kehadiran pejabat daerah dan berbagai pemangku kepentingan program, dan Hartawan (2023) menerapkan teori Van Meter Van Horn dengan mengkaji standar dan target, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, sosial. kondisi, ekonomi politik, dan disposisi pelaksana.

Kerangka Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Bagian penting dari keseluruhan struktur kebijakan adalah tahap implementasi. Kemampuan pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan dengan benar dan mencapai hasil yang diinginkan di lapangan dapat dipastikan pada tahap implementasi. Kebijakan publik harus diwujudkan dalam tindakan untuk mencapai output dan outcome yang ditentukan (Sasmito & Nawangsari, 2019). Implementasi menurut Syauckani (2004) dalam Dzulqarnain dkk. (2022), merupakan serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang suatu kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan hasil yang diinginkan. Serangkaian tindakan ini meliputi: (1) pembuatan seperangkat peraturan sebagai sarana tambahan untuk menafsirkan kebijakan; (2) menyediakan sumber daya untuk mendukung upaya implementasi, seperti uang tunai, sarana, dan prasarana; dan (3) menunjuk orang-orang yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan proses. (3) bagaimana menyampaikan kebijaksanaan praktis kepada masyarakat umum.

Proses implementasi sebagaimana didefinisikan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Dzulqarnain dkk. (2022), adalah jalur yang diambil suatu kelompok atau individu untuk mencapai suatu tujuan sambil menerapkan suatu kebijakan; tentu saja, proses ini harus didasarkan pada aturan. Strategi top down dan pendekatan bottom up merupakan dua metode yang digunakan dalam proses implementasi kebijakan. Istilah “top down” mengacu pada strategi yang berasal dari pemerintah. Karena kebijakan-kebijakan yang menggunakan teknik ini sering kali cenderung gagal dan tidak dapat dilaksanakan dengan sukses, maka sering kali kita mendapati bahwa pemerintah sendirilah yang melakukan proses pembentukan kebijakan dalam situasi ini, tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Metode Implementasi Van Horn dan Van Metter Subarsono (2022) menjelaskan penanda kinerja yang dipengaruhi oleh Van Metter dan Van Horn (1975) sebagai berikut:

1. Tujuan dan tolok ukur kebijakan Untuk mencapainya, standar dan tujuan kebijakan harus dapat diukur dan transparan. Tujuan dan standar kebijakan yang tidak jelas dapat menimbulkan beragam penafsiran dan memudahkan para pelaku implementasi untuk berbeda pendapat satu sama lain.

2. Sumber Daya Material, baik manusia maupun non manusia, diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan. Inisiatif pemerintah, seperti Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang melayani keluarga berpenghasilan rendah di daerah pedesaan, terkadang kurang berhasil karena kualitas pihak yang melaksanakannya.
3. Komunikasi organisasi dan inisiatif untuk memperkuatnya. Badan-badan lain harus berkoordinasi dan mendukung suatu program. Oleh karena itu, agar suatu program berhasil, lembaga-lembaga harus bekerja sama dan mengoordinasikan upaya mereka.
4. Atribut agen implementasi. Struktur birokrasi, pola hubungan dalam birokrasi, dan norma merupakan ciri-ciri agen pelaksana yang dapat mempengaruhi bagaimana suatu program dilaksanakan.
5. Keadaan masyarakat, politik, dan ekonomi. Sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat memfasilitasi implementasi kebijakan yang efektif termasuk dalam variabel ini. Kualitas peserta mencakup apakah mereka mendukung atau menolak opini publik mengenai lingkungan hidup dan apakah elit politik mendukung proses penerapan kebijakan.
6. Disposisi pelaksana, yang mencakup sikap mereka terhadap implementasi kebijakan dan diterima atau tidaknya mereka, akan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan

Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Pandangan Sunggono dalam Aviandani et al., (2022) menyebutkan ada empat hal yang menghambat pengambilan kebijakan, yaitu:

1. Isi kebijakan
Di antara unsur-unsur yang berkontribusi terhadap kegagalan implementasi kebijakan adalah dikarenakan masih samarnya isi dari kebijakan tersebut, kebijakan yang terlalu umum, dan tujuan yang tidak terperinci. Selain itu kegagalan juga terjadi karena kurangnya ketetapan internal ataupun eksternal dari kebijakan yang dilaksanakan, dan masih kurangnya sumber daya yang tersedia misalnya dana atau biaya, waktu, serta tenaga manusia.
2. Informasi
Jika setiap implementor tidak mendapatkan informasi dengan baik, maka dipastikan telah terjadi miskomunikasi di dalam birokrasi tersebut
3. Pendampingan
Apabila masyarakat tidak mendukung, maka kebijakan publik akan sulit dijalankan. Dukungan Implementasi kebijakan publik akan sulit terealisasi jika kurang mendapatkan dukungan dari publik
4. Pembagian potensi
Perbedaan tanggung jawab dan wewenang organisasi pelaksana berdampak pada pendistribusian potensi. Apabila terdapat batasan

wewenang yang ambigu atau tidak ditetapkannya tugas dan tanggung jawab berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing orang, maka akan timbul ketimpangan dalam struktur organisasi.

Program Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS)

Program P3KSS berkisar pada tema kesetaraan gender. Program ini berkaitan dengan kemajuan pemberdayaan perempuan yang berdampak pada pembangunan yang berkeadilan dan netral gender. Program P3KSS berbentuk pemberdayaan, yaitu suatu proses yang bertujuan untuk memberikan daya dan mengembangkan potensi serta kemampuan yang dimiliki masyarakat agar mampu mandiri dan mampu mengambil keputusan yang bermanfaat bagi keluarganya. Pelatihan di P3KSS diperuntukkan bagi seratus perempuan penduduk desa prasejahtera. Program P3KSS pada hakikatnya adalah sebuah latihan di mana sekelompok pengawas dari berbagai departemen/lembaga turun ke lapangan dan bertemu serta mendengarkan berbagai permasalahan perempuan yang dihadapi para warga binaan.

Dalam rangka pengembangan masyarakat desa atau kelurahan, Program P3KSS Terpadu bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan melalui pengembangan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lingkungan hidup untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sejahtera, bahagia, dan sehat, bersama perempuan. Bertindak sebagai penggerak utama kelompok. Setelah bekerja dengan Tim Regional untuk meningkatkan dan memberdayakan perempuan di desa atau kelurahan, kegiatan penilaian ini adalah hasil akhirnya.

Berikut tujuan program P3KSS:

1. Tujuan Umum
Meningkatkan kontribusi perempuan terhadap pembangunan untuk membangun keluarga yang sejahtera dan sehat
2. Tujuan khusus
 - 1) Meningkatkan kedudukan pendidikan perempuan
 - 2) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan keluarga, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku positif keluarga dan perempuan, khususnya dalam beragam profesi.
 - 3) Meningkatkan kualitas perkembangan anak dan remaja
 - 4) Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kesehatan umum
 - 5) Meningkatkan kesadaran tentang menjaga lingkungan
 - 6) Membangkitkan kesadaran berbangsa dan bernegara
 - 7) Memberikan pengaruh yang lebih besar kepada lansia
 - 8) Meningkatkan perekonomian masyarakat setempat

Sebagaimana tercantum dalam pedoman pelaksanaan P3KSS tahun 2022, terdapat beberapa tahapan dalam proses pelaksanaan P3KSS. Langkah-langkah ini meliputi:

1. Perencanaan
Tujuan dari proses perencanaan ini adalah untuk mencari lokasi P3KSS. Lokasi-lokasi tersebut merupakan hasil rekomendasi yang disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masing-masing kabupaten atau kota.
2. Pengelompokan
Berdasarkan kesamaan potensi dan minat, 100 (seratus) warga binaan tersebut dibagi menjadi 10 kelompok. Pelatihan dan dukungan rutin diberikan kepada setiap kelompok untuk berbagai kegiatan kelompok.
3. Pertemuan awal dan Validasi
Pada Pertemuan Awal (PA), pendamping sosial P3KSS memfasilitasi proses sosialisasi dan mengedukasi warga binaan tentang P3KSS.
4. Pelatihan
Selain itu, kelompok warga yang didukung dilatih tentang kekuatan dan minat masing-masing. Pelatihan tersebut menekankan pada kemampuan wirausaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
 - a) Rapat Persiapan Tim Penilai Pelaksanaan Lomba
 - b) Penilaian Kader
 - c) Verifikasi Lapangan
 - d) Peyerahan Hadiah
 - e) Pendampingan

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian ini fokus pada penerapan teori Van Meter Van Horn pada pelaksanaan program P3KSS di Desa Sumber Agung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung di Hartawan (2023). Dalam penelitian, ada dua kategori data: primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan validasi hasil. Teknik keabsahan data dengan uji kredibilitas.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Program Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling

Program P3KSS di Provinsi Lampung sudah dilakukan sejak tahun 2016, dan tahun 2019 sampai dengan 2022 telah di adakan, adapun penilaian oleh Tim Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 terlaksana pada setiap kecamatan di Provinsi Lampung, setelah penilaian Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling dinyatakan sebagai terbaik di Kota Bandar Lampung,

tertuang dalam SK No.B.103/23/12/2021 oleh Walikota Bandar Lampung tanggal 12 April 2021, dalam membantu meningkatkan P3KSS di masing-masing daerah dalam pelaksanaannya ternyata membutuhkan proses dan adanya kerjasama dalam pengimplementasikan program P3KSS tersebut baik dari pihak pemerintah dan juga lembaga masyarakat seperti Dinas PPPA kota Bandar Lampung, Tim Penggerak PKK Kecamatan Kemiling dan Tim Penggerak PKK Kelurahan Sumber Agung.

1. Standar dan Sasaran

Menurut (Subarsono, 2022), standar & sasaran yakni diwajibkan jelas & lugas supaya dapat direalisasikan. Apabila tidak jelas atau kabur, akan terjadi salah pemahaman kemudian mudah memunculkan konflik antara implementor kebijakan. Artinya hubungan standar dan sasaran yang ada bisa menumbuhkan rasa kepercayaan dan komitmen yang dibangun antara pihak yang bekerjasama. Karena pada dasarnya standar dan sasaran memiliki masing masing peran yang jelas dan harus bisa menempatkan dirinya terutama dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Melalui variabel standar dan sasaran kebijakan, suatu kebijakan dapat diukur berhasil atau tidak dalam implementasinya. Program P3KSS di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling ini dapat dilihat berhasil atau tidaknya diimplementasikan di Kelurahan Sumber Agung dari apakah tujuan dari diimplementasikannya program P3KSS ini dari indikator keberhasilan program dengan realisasi program di kelurahan sumber agung. Tolok ukur dan tujuan kebijakan ini berguna dalam menjelaskan berbagai tujuan kebijakan secara kolektif serta tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Program P3KSS ini sendiri merupakan program yang dikeluarkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk meningkatkan kualitas perempuan sesuai dengan daerahnya masing-masing, Sehingga Gubernur Lampung pada tahun 2020, yaitu melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 147 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Provinsi Lampung 2020-2024.

2. Sumber Daya

Tentu saja, sumber kebijakan memainkan peran penting dalam proses implementasi kebijakan. Sumber daya baik non-manusia maupun manusia diperlukan untuk mendukung implementasi suatu kebijakan, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Hartawan et al., (2023). Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan karena merekalah yang menjadi pelaksananya. Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sebagaimana mestinya pada saat implementasi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut penelitian sebelumnya (Arifin, 2013), sumber daya manusia

(SDM) memainkan peran penting dalam organisasi ini karena mereka bertindak sebagai pengelola dan penggerak sistem, sehingga memastikan kelancaran operasionalnya.

Tentu saja, dalam melaksanakan suatu program, ada sumber daya lain selain sumber daya manusia yang harus diperhatikan. Sumber-sumber lain tersebut adalah sumber daya finansial. Jika sumber daya manusia tersedia dengan baik, namun tidak diiringi dengan anggaran dana maka implementasi suatu program tidak dapat berjalan. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tentu saja membutuhkan anggaran dana yang cukup besar. Adapun ketersediaan anggaran yang sebenarnya berpengaruh besar pada pelaksanaan suatu program pemerintah. Akan tetapi yang terjadi adalah ketersediaan dan kejelasan anggaran tersebut tidak dilakukan secara terbuka, dan hanya diketahui oleh pihak Dinas PPPA saja. Sedangkan untuk aktor lain tidak mengetahui tentang kejelasan anggaran tersebut apakah sudah digunakan atau belum untuk menunjang program P3KSS di Kelurahan Sumber Agung, sehingga dalam menjalankan program ini terdapat kendala dalam menjalankan tugasnya seperti implementor P3KSS tidak dibekali dengan anggaran/dana sehingga untuk fasilitas laptop, proyektor, ATK, dan perlengkapan lainnya, pendamping dituntut untuk membeli perlengkapan tersebut menggunakan dana pribadi, atau dapat meminjam dengan aparat setempat.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi yang terjalin tersebut adalah berkaitan dengan penyampaian yang dilakukan oleh Dinas PPPA Kota Bandar Lampung sebagai leading sector hal tersebut perlu dilakukan juga sebagaimana tercantum pada Laporan Hasil P3KSS di Kelurahan Sumber Agung tahun 2022 Tentang Struktur Tim Pembina program P3KSS Periode Tahun 2022, bahwa komunikasi yang perlu dijalankan juga berpedoman pada komitmen tersebut sehingga pelaksanaan kegiatan kerjasama tersebut disampaikan dengan jelas.

Koordinasi pada implementor P3KSS Kelurahan Sumber Agung dengan pemerintah dalam program P3KSS di Kota Bandar Lampung dilakukan pada satu komando yang dipimpin dan mengarah ke Dinas PPPA Kota Bandar Lampung yang membantu mengarahkan kepada Kecamatan Kemiling, Kelurahan Sumber Agung serta Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (Tim PKK) untuk pelaksanaan rapat ataupun pelatihan dalam menunjang program P3KSS. Dimana pelaksanaan rapat yang selalu dipimpin oleh pihak Dinas PPPA untuk merencanakan jalannya program P3KSS dengan adanya kontribusi kerjasama dari implementor yang terlibat, namun berjalannya kegiatan rapat tersebut belum dilakukan secara rutin sehingga masih miskomunikasi pada warga binaan, hal ini kedepannya dapat menjadi evaluasi bagi para implementor dalam hubungan komunikasi pada program P3KSS agar lebih berjalan dengan rutin dan lancar. Menurut

Aditnya (2018), komunikasi terhambat oleh cara penyampaian informasi secara tidak langsung, yang berarti masih banyak orang yang kurang memahami aturan ini. Komunikasi informasi secara langsung diperlukan untuk memastikan bahwa informasi tersebut tepat sasaran.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Tentu saja, salah satu komponen terpenting dalam proses implementasi adalah agen pelaksana. Proses pelaksanaan suatu program sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri lembaga pelaksana. Van Meter dan Van Horn dalam Hartawan et al., (2023) menyatakan bahwa keputusan organisasi untuk menerima atau menolak suatu program untuk implementasi berkorelasi dengan fitur dari lembaga pelaksana. Untuk melaksanakan program P3KSS di suatu daerah tentu bukan hal yang mudah karena kecenderungan masyarakat yang masih tradisional dapat menghambat peningkatan peranan perempuan. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri terlebih jika daerah tersebut terletak di pelosok daerah yang jauh dari jangkauan pusat perkotaan. Kemampuan dan dedikasi lembaga pelaksana untuk melaksanakan program sesuai dengan standar dan prosedur yang relevan diperiksa dalam penelitian tentang karakteristik agen pelaksana. Hal ini membantu organisasi atau agen pelaksana memahami tugas utama, tanggung jawab, dan peran masing-masing, baik secara individu maupun kolektif organisasi.

5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan keyakinan Van Meter Van Horn bahwa keadaan politik, sosial, dan ekonomi yang tidak menguntungkan dapat berkontribusi terhadap kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan apakah lingkungan politik, sosial, dan ekonomi menguntungkan sebelum mengambil kebijakan.

Dilihat dari kondisi ekonomi, dalam implementasi program P3KSS di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling secara umum sudah kondusif. Kelurahan Sumber Agung memiliki potensi sumber daya alam yang telah dikembangkan. Kelurahan Sumber Agung dapat memanfaatkan potensi desa untuk mengembangkan ekonomi warga binaan melalui pelatihan yang sudah dilakukan untuk peluang usaha dan objek wisata alam di Kelurahan Sumber Agung yang dapat memberikan peluang bagi warga binaan untuk menitipkan usahanya di setiap tempat wisata.

Kondisi politik ini berkaitan dengan bagaimana hubungan kepemimpinan dengan pelaksanaan program P3KSS di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan kemiling. Dalam hal kepemimpinan, lurah Sumber Agung dapat dikatakan sudah memimpin dengan cukup baik dalam pelaksanaan program P3KSS di Kelurahan Sumber Agung.

Dimana tujuan dari lurah Sumber Agung adalah melalui program P3KSS ini dapat memberikan dampak perubahan bagi masyarakat di Kelurahan Sumber Agung menjadi lebih baik. Keberhasilan implementasi kebijakan P3KSS juga tidak terlepas dari dukungan para aparat dan warga yang sudah menjalin hubungan dan kolaborasi dengan baik.

6. Disposisi Implementor

Pola pikir orang yang melaksanakan kebijakan merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi efektivitasnya. Para pelaksana akan dengan senang hati menjalankan kebijakan apabila menyetujui beberapa ketentuannya; Namun, jika pendapat mereka berbeda dengan pendapat pembuat kebijakan, maka akan muncul beberapa permasalahan dalam penanganan proses implementasi. Menurut Van Meter Van Horn dalam Widodo (2018), temperamen seseorang mempengaruhi seberapa sukses kebijakan diterapkan. Berhasil tidaknya proses implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sikap menerima atau menolak pihak yang melaksanakan kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan publik biasanya bersifat top-down, yang berarti bahwa pengambil keputusan tidak mengetahui kebutuhan masyarakat secara tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Selain itu, kebijakan yang diimplementasikan tidak hanya merupakan hasil rumusan masalah dari warga lokal yang telah memiliki pemahaman menyeluruh terhadap permasalahan yang ada di komunitasnya (Azizah, 2021).

Sikap penerimaan dalam pelaksanaan program P3KSS ini ditunjukkan dengan berjalannya program P3KSS ini di Kelurahan Sumber Agung. Meskipun program P3KSS ini merupakan program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, namun Pemerintahan Daerah cukup menerima dengan baik program tersebut. Hal tersebut dikarenakan di era perkembangan zaman yang semakin maju maka dengan adanya pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan daerah akan membantu daerah dalam perekonomiannya. Para Tim PKK dan warga binaan di Kelurahan Sumber Agung menerima dengan baik program P3KSS ini dan merasa terbantu dengan adanya program tersebut. Hal tersebut dapat terlihat dari Tim PKK di Kelurahan Sumber Agung hingga warga binaan di Kelurahan Sumber Agung yang merasakan bahwa program ini memberikan dampak yang baik bagi perekonomian khususnya para perempuan yang kesulitan ekonomi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Konsekuensi dari komitmen kuat masing-masing aktor, maka hubungan antara warga binaan, Tim PKK, dan Dinas PPPA tetap berjalan dengan baik, meski terdapat sejumlah kekurangan dalam temuan penelitian, demikian kesimpulan yang diambil dari enam teori yang dikemukakan Van. Meter Van Horn dalam Hartawan (2023). Sehingga implementasi program P3KSS ini dapat disimpulkan dalam implementasi nya berjalan dengan sesuai

kebijakan dan mencapai tujuan dari program tersebut. Faktor pendukungnya yaitu dari program P3KSS terhadap peningkatan peran perempuan dapat dilihat dari tingkat kualitas, pemenuhan dan partisipasi dibidang ekonomi yang semakin meningkat dan adanya kemudahan dalam mencari mata pencaharian serta seluruh pemerintah daerah maupun masyarakat mendukung dalam seluruh kegiatan P3KSS. Selain itu mulai munculnya kesadaran dari warga binaan khususnya para perempuan yang menjadi kepala keluarga untuk dapat merubah pola pikirnya.

Hambatan dalam Pelaksanaan Program P3KSS di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling adalah yaitu kurangnya kemampuan finansial dalam pelaksanaan P3KSS di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling serta minimnya komunikasi antar pendamping warga binaan dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Andi Cudai Nur dan M. Guntur. 2019. Analisis Kebijakan Publik. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, hlm. 3
- Adrian, M. R., Kutandi, C., & Pramukty, R. 2023. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sistem Informasi: Sumber Daya Manusia, Bisnis, Teknologi. *JKA: Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(3), 126–133.
- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. 2020. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 150–159.
- Arifin, N. 2013. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jepara: Unisnu Press.
- Artantya, P. 2014. *Kajian Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Induk Majenang di desa Sindangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Purwokerto).
- Aviandani, K., Cikusin, Y., & Sunariyanto. 2022. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. *Jurnal Respon Publik*, 16(6), 43–52.
- Azizah, N. 2021. *Implementasi Program Indonesia Pintar pada Jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Bryan A. Garner. 2009. *Black's Law Dictionary* (Edisi 9). Minnesota: West Publishing, hlm. 1348.
- Dzulqarnain, G. Z., Meigawati, D., & Basori, Y. F. 2022. Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. *Jurnal Professional (Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik)*, 9(1), 109–116
- Fatmala, P. A. 2019. Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Sangiang Jaya Kota Tangerang (Studi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju

- Keluarga Sehat dan Sejahtera) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri" SMH" Banten).
- Hamdi, M. 2014. *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi)* (R. Sikumbang (ed.)). Ghalia Indonesia.
- Handyaningrat, S. 1982. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : PT Gunung Agung
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. 2020. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In H. Abadi (Ed.), *Repository.Uinsu.Ac.Id* (Cetakan 1, Issue April). Pustaka Ilmu
- Hartawan, R. C., Kosasih, F., & Rochmani. 2023. Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)*, 2(4), 1348–1358.
- Hermanto Suaib, dkk. 2022. Pengantar Kebijakan Publik. Makassar: Humanities Genius, hlm. 7-8.
- Ibrahim, I. 2022. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato. *MADANI: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(1), 113–137.
- Ihsan, M. A. 2019. Pemberdayaan Perempuan Dalam Masyarakat Konserfatif. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 11(1), 14-33.
- Karyaningsih, P. D. 2018. *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Lasmi, A., Bayhaqi, H., Negeri, I., & Utara, S. 2022. Dawatuna : Journal of Communication and Islamic Broadcasting Dawatuna
- Lestari, A. Y., Humaedi, S., & Rusyidi, B. 2019. Partisipasi Perempuan Dalam Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2Wkss) Di Rw 12 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. *Share: Social Work Journal*, 9(1), 49.
- Mahardhani, A. J. 2018. Advokasi Kebijakan Publik. In *Gastronomía ecuatoriana yturismo local*. (Vol. 1, Issue 69). Calina Media.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook Amerika*. Los Angeles: Sage Publications.
- Mustari, N. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)* (Cetakan Pe, Vol. 1). LeutikaPrio.
- Nuraini, Z. 2017. Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (Studi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. 2019. Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu.
- Situmorang, C. H. 2016. *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok: Social Security Development Institute (SSID).

Subarsono. 2022. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)* (Cetakan XI). Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA cv.

Sulistiowati, R., Prihantika, I., Atika, D. B., & Choirunisa, N. 2020. Dinamika Aktor dalam Perumusan Kebijakan Desa Layak Anak. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 4(1), 26–35.